

# Reformasi kebijakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah.

## Lembaga Administrasi Negara - MAKALAH "ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH"



Description: Reforming government policy on local government administration in Indonesia.

- Reformasi kebijakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah.
- Reformasi kebijakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah.

Notes: Includes bibliographical references (p. 205-208).

This edition was published in 2006



Filesize: 33.58 MB

Tags: #Komitmen #Reformasi #Birokrasi #Pemerintah #Daerah

### Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas

Perubahan pola pikir mindset ini akan sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan budaya kerja birokrasi. Reformasi birokrasi juga harus membongkar pola pikir dan mentalitas lama aparatur sipil negara sehingga lebih terbuka menyingkapi berbagai tantangan pembangunan yang ada.

### MAKALAH "ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH"

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Di samping itu, sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya. Administrasi sangat di perlukan dalam kehidupan sehari-hari.

### Komitmen Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Jadi, walaupun hanya satu orang PKI yang ada di suatu daerah akan tetap terjamin menduduki peminan DPRD. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah dari eselon II ke atas wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja LAK.

### Komitmen Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% empat puluh persen untuk variabel jumlah penduduk, 35% tiga puluh lima persen untuk variabel luas wilayah dan 25% dua puluh lima persen untuk variabel jumlah APBD.

### Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas

Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas seperti; masih rendahnya kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian di beberapa daerah, ditemukan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan reformasi birokrasi di daerah adalah komitmen dan political will kepala daerah Prasajo, Maksun dan Kurniawan, 2006:

175-176. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reofimasi birokrasi.

## Related Books

- [A theory of public opinion](#)
- [Dirāsāt fi: ‘ilm al-ijtimā‘ al-tarbawī](#)
- [NEEDLE-FREE SYSTEM NURSING IN-SERVICE](#)
- [Ghost dance Messiah](#)
- [Its no problem!](#)